



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

*Siaran Pers*  
*17 Februari 2015*

## **Pemerintahan Konstitusional keenam harus menjamin independensi judicial dan pemisahan kekuasaan**

Hari ini, 16 Februari 2015, Timor-Leste kembali mencatat sebuah sejarah baru dalam proses penguatan dan pembangunan kedaulatan Negara Timor-Leste melalui pelantikan terhadap Perdana Menteri Pemerintahan Konstitusional Keenam Dr. Rua Maria Araújo bersama para anggota menteri lainnya. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Presiden Taur Matan Ruak, di Istana Negara “Palasio Novre-Lahane”, Dili, Timor-Leste.

JSMP mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri baru dan para anggota kabinetnya dan mendorong Perdana Menteri untuk mengembalikan kredibilitas dan independensi sektor peradilan. Selama ini, sektor peradilan menghadapi berbagai tantangan karena adanya pengaruh dan campur-tangan politik dan pemerintah baru harus mengembalikan kekuasaan pengadilan agar mereka dapat menjalankan fungsi mereka secara bebas. Karena pengadilan merupakan salah satu sektor fundamental untuk memastikan pemerintahan yang baik dan bersih dan memberantas tindakan korupsi.

JSMP sangat senang melihat Perdana Menteri mengawali pidato pelantikannya dengan menggarisbawahi komitmen dan loyalitas politiknya untuk tunduk kepada mandat konstitusional, perintah undang-undang, pemisahan kekuasaan dan penghargaan terhadap lembaga-lembaga Negara lainnya termasuk lembaga judicial.

JSMP percaya bahwa dalam sebuah Negara demokrasi, tidak ada lembaga Negara yang memiliki kedaulatan/kekuasaan politik lebih besar dari lembaga Negara lainnya, dan pengadilan merupakan sebuah lembaga penting yang harus dihormati semua pihak.

“Sangat penting bagi pengadilan untuk mendapatkan kembali kredibilitas dan independensi mereka sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan memastikan bahwa intervensi/campur tangan terhadap independensi judicial dan pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan tidak akan pernah ada dalam sebuah Negara demokrasi,” kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

JSMP mendorong Pemerintahan Konstitusional Keanam untuk melakukan segala upaya yang mungkin dan mencari opsi alternatif lainnya untuk memulihkan sektor peradilan. Pemerintah perlu menginvestasikan lebih besar terhadap sumberdaya manusia di pengadilan melalui penguatan terhadap Pusat Pelatihan Judisial, menyediakan kondisi kerja yang layak bagi sektor peradilan, menjamin keamanan mereka, menerapkan Undang-Undang Perlindungan Saksi, meninjau kembali Hukum Pidana yang berlaku untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, pelecehan, inses dan segala bentuk kekerasan berbasis gender lainnya dan memberikan kedaulatan penuh kepada pengadilan untuk mengadili kasus-kasus korupsi secara bebas.

JSMP percaya bahwa Pemerintahan Konstitusional Keanam yang diberi mandat dan kepercayaan selama dua tahun ke depan akan menjalankan pemerintahan berdasarkan norma-norma dan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi untuk mengembalikan kedaulatan fungsi institusi-institusi demokratis dan secara khusus memperbaiki kepercayaan publik terhadap sektor peradilan dan kredibilitas Timor-Leste di mata dunia.

Untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)  
[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)  
Telephone: 3323883 | 77295795